



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti Angayu Bagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dapat disusun sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 yang secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu Rancangan Rencana Kerja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali



I Wayan Jarta
NIP. 19641111 198603 1 023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Bali Tahun 2025 6

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI BALI TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Provinsi Bali 22

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 29

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 30

3.3 Program dan Kegiatan 33

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN.....34**

BAB V PENUTUP.....35



DAFTAR TABEL

Diagram 1.1 Hubungan Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 3

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 9

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Golongan.....9

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Jabatan Struktural..... 9

Tabel 2.4 Aset Pada Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian..... 9

Tabel 2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023..... 10

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2019-2023..... 18

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Bali..... 21

Tabel 2.9 Program dan Kegiatan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2025..... 24

Lampiran 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 Provinsi Bali



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Bali selain sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi penyelenggaraan dalam pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan Industri Daerah di Provinsi Bali sangat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki berbagai potensi/keunggulan dalam menunjang nilai tambah produk-produk hasil karya para perajin Bali yang memiliki ciri khas yang berakar pada seni dan budaya berlandaskan Tri Hita Karana. Selain produk-produk seni, kebutuhan utama yaitu bahan pangan masyarakat termasuk wisatawan adalah kebutuhan pokok yang harus tersedia, maka ketersediaan bahan pokok haruslah terjaga stabilitasnya, termasuk juga memberikan perlindungan terhadap konsumen. Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui program dan kegiatan dalam rangka mendukung Pariwisata seperti meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar regional maupun global, serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok dan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk, terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok serta terlindunginya konsumen, tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sesuai dengan pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun. Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan bahan masukan untuk Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025. Melalui Forum Perangkat Daerah, Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Provinsi Bali selanjutnya dijadikan bahan Musrenbang RKPD. Setelah RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala daerah, maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disempurnakan selanjutnya dikirim Kepada Bappeda Provinsi Bali untuk di Verifikasi. Bila hasil verifikasi dari Bappeda Provinsi Bali memandang bahwa Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan RKPD, maka Bappeda Provinsi Bali mengirim Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ke Penjabat Gubernur melalui Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2024 didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2478 Tahun 2024 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2025 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

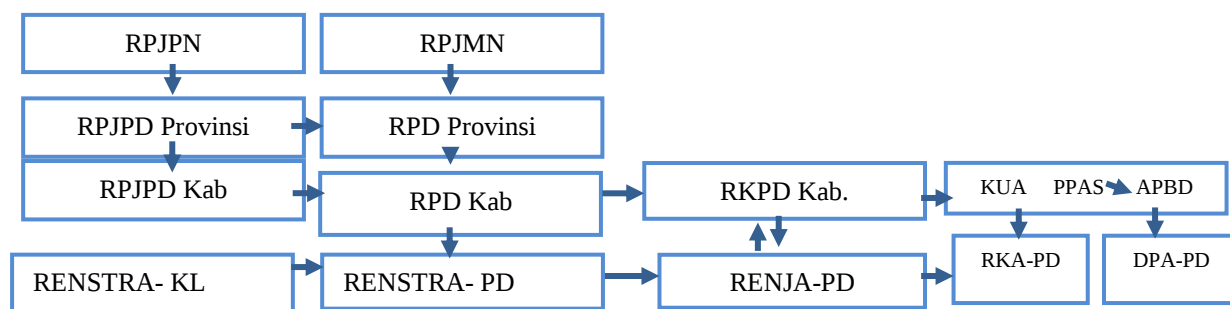
Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali, dilanjutkan pada proses di Sekretariat Daerah. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali. Materi orientasi meliputi: tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusun Renja Perangkat Daerah, dan kesiapan Data SIPD. Bersamaan dengan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Tim menyusun agenda kerja dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi Tim.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021



Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2478 Tahun 2024 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat daerah, dan Renja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD, maka maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2025 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2024-2026 khususnya Rencana Kerja Tahun 2025 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2024 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2025 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2025.
- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2025



- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD tahun 2025

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rencana Kerja RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bab IV. Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI TAHUN LALU

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rencana Kerja RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Perindustrian dan Perdagangan merupakan Urusan Pilihan. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Perindustrian dan Perdagangan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah: melaksanakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi: merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan serta fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2023, komposisi kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

Tabel.2.1
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	22
2	Strata 1	36
3	SLTA / Sederajat /SMA	17
4	SD	0
Total		75

Tabel.2.2
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	6
Total		14

Tabel.2.3
Aset Pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN/JUMLAH
1	Tanah	3 bidang/11.378 m2
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	3 Unit
3	Kendaraan Roda empat	10 unit
4	Kendaraan roda dua	14 Unit
5	Laboratorium UPT BPSMB	1 Unit

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 38 (tiga puluh delapan) Kegiatan 40 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun kelima akan diuraikan secara detail berikut ini:



Tabel 2.5

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Indeks Keberdayaan Konsumen</i>	766,581,780	40,8	749,089,931	56.05			
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Konsumen Cerdas</i>	499,644,896	100%	498,953,076	100%			
				☼ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK yang Aktif	456,000,000	1 BPSK	456,000,000	1 BPSK			
				☼ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM yang Aktif	43,644,896	7 LPKSM	42,953,076	7 LPKSM			
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk SNI yang diawasi	74,141,296	10 Produk	67,874,206	10 Produk			
				☼ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barangng Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	74,141,296	90 Laporan	67,874,206	195 Laporan			



NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<i>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Pengujian</i>	<i>Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan</i> Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	192,795,588	55 Sertifikat	182,262,649	46 Sertifika t			
	Perdagangan	Dinas Perindustria n dan Perdagangan		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	48,474,896	30%	47,955,896	30%			
				<i>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali</i>	48,474,896	30%	47,955,896	30%			
				☼ Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	48,474,896	5 Laporan	47,955,896	5 Laporan			
	Perdagangan	Dinas Perindustria n dan Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar ber SNI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	108,065,500 108,065,500	6 Pasar 8 Laporam	23,421,000 23,421,000	5 Pasar 8 Laporan			



NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				☼ Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	108,065,500	8 Laporan	23,421,000	8 Laporan			
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	<i>Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif</i>	8,405,700	64,95 %	7,545,600	56,79			
				<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya</i>	8,405,700	25 Pelaku Usaha	7,545,600	2 Pelaku Usaha			
				☼ Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	8,405,700	25 Pelaku Usaha	7,545,600	15 Pelaku Usaha			
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		<i>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	257,658,776	85%	254,089,876	85,14			
				<i>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka</i>	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	257,658,776	14.000 Dokumen	254,089,876	21267 Dokumen			



NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<i>Pengenal Importir (API)</i>								
				☼ Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	257,658,776	14.000 Dokumen	254,089,876	21267 Dokumen			
	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang</i>	8,387,470,644	1,5%	7,256,702,137	36,01 %			
				<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	<i>Persentase Industri yang dibina</i>	8,387,470,644	1,5%	7,256,702,137	36,01 %			
				☼ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	269.146.496	10 Laporan		10 Laporam			
				☼ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.551.068.348	12 Laporan		12 Laporan			
	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase Ketersediaan Data Industri</i>	271,576,000	100%	26,942,000	100%			



NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ☼ Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	271,576,000	100%	26,942,000	100%			
						271,576,000	270 Dokume n		549 Dokume n			



Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 adalah: dari 9 (Sembilan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan, capaian target kinerja kegiatan tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tergolong baik, secara umum Realisasi keuangan sebesar Rp 28.606.200.004 atau 89,30% dari target Rp 25.545.876.634,00.

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki, sedangkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 IKK sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2019-2023

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase stabilitas harga barang Pokok	<10%	<10%	<10%	<7%	<7%	3,86%	4,10%	3,20%	4,70%	3,32%
Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	30%	30%	30%
Indeks Keberdayaan Konsumen	32	34	36,8	38,8	40,08	32,8	31,79	49,68	52,35	56.05
Jumlah Pasar ber SNI	4	4	4	6	6	4	4	4	5	5
Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64,95%	64,95%	64,95%	64,95%	64,95%	67,42%	64,95%	52,16%	59,97%	56.79%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	83	84	85	80,7	81,85	82,07	83,04	85,14
Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	4,39%	1,63%	1,50%	1,62%	36,01%
Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu yang berkembang pada tahun 2024 Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a) Masih Lemahnya Daya Saing Industri Bali
- b) Masih Rendahnya Pemasaran Produk Lokal
- c) Masih Berfluktuasinya Harga Kebutuhan Barang Pokok
- d) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas Di Provinsi Bali
- e) Masih Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Pentingnya Hak Konsumen
- f) Belum Optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pedoman Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang berlaku 20 tahun (2020-2040) sehingga terjadi keselarasan pembinaan dan pengembangan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan potensi industri dan telah diusulkan kegiatan penyusunan RPIP pada tahun 2021. Untuk meningkatkan daya saing produk berbahan baku kayu sehingga dapat diterima di negara-negara yang mempersyaratkan ketentuan tersebut, maka pelaku usaha industri kayu perlu mendapatkan pendampingan untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu, hal ini dapat diatasi melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Industri Kayu pada tahun 2021. Industri yang berkembang di Bali adalah Industri Kecil Menengah yang mempunyai keterbatasan dalam memasarkan produknya, untuk itu diperlukan fasilitasi untuk mengikuti pameran, baik pameran dalam daerah seperti Pesta Kesenian Bali dan pameran yang bersifat nasional maupun yang berorientasi ekspor sehingga kegiatan pameran sangatlah penting untuk dilakukan.
- 2) Berbagai faktor baik internal maupun eksternal akan berpengaruh dalam proses pemasaran produk lokal. Jenis produk lokal yang hendak dijual oleh pelaku usaha sangat sulit mendapatkan akses pasar dan juga menjadi sebuah masalah ketika daya saing produk lokal kalah dari produk impor karena minat dan pengetahuan masyarakat terhadap produk lokal masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kiat-kiat untuk meningkatkan pemasaran produk lokal dan peningkatan kecintaan masyarakat menggunakan produk lokal.



- 3) Terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok menjadi permasalahan yang terus membebani masyarakat. Kondisi perekonomian yang cenderung kurang stabil membuat harga-harga komoditas yang menjadi kebutuhan primer masyarakat terus mengalami naik-turun. Hampir dalam kesehariannya, semua negara berkembang di dunia mengalami fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi harga ini kadang bisa terjadi normal dalam ruang lingkup harian, atau kadang juga bisa sangat tidak normal melebihi batas estimasi dalam waktu yang lama.maka dari itu perlu nya dilakukan pengendalian harga kebutuhan pokok dan penting.
- 4) Untuk mendorong kinerja ekspor Bali, maka sangat penting memperkuat sarana dan prasarana dalam rangka memperlancar pengurusan dokumen ekspor, selain itu diperlukan pengetahuan yang memadai terkait kebijakan ekspor/impor yang sering mengalami perubahan sehingga diperlukan sosialisasi peraturan bagi para eksportir/importir serta promosi ke luar negeri, Untuk meningkatkan ekspor bersih, maka nilai impor haruslah lebih kecil dari nilai ekspor, maka para importir perlu mendapatkan pembinaan agar mengimpor barang sesuai dengan ketentuan. Peningkatan nilai ekspor, salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang khusus terhadap produk-produk unggulan daerah Bali sehingga pembinaan dan pemasarannya haruslah difokuskan pada produk unggulan tersebut. Untuk mengetahui produk unggulan daerah Bali dan strategi dalam peningkatan ekspor, maka terlebih dahulu diperlukan kajian/identifikasi produk unggulan.
- 5) Konsumen cerdas harus memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.maka dari itu pemerintah wajib memfasilitasi serta memberikan edukasi kepada konsumen dalam rangka peningkatan jumlah konsumen cerdas
- 6) Untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan maka perlunya optimalisasi terhadap Layanan Pengujian Mutu Barang, seperti melalui peningkatan jumlah SDM Penguji Mutu Barang serta peremajaan alat-alat serta laboratorium, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan jenis pengujian yang lebih banyak.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2025

Rancangan RKPD Provinsi Bali baru diedarkan pada minggu ketiga bulan Januari 2025, sehingga penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan baru dilakukan pada minggu ke empat bulan Januari 2024. Untuk menyusun Renja dilakukan Review Rencana Kerja RKPD. Dalam Review terhadap Rancangan RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2023 dan kebutuhan tahun 2025. Alasan proses tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2025, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda (Lampiran 2 Tabel 2.8)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Tabel 2.8
Usulan Masukan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Bali

No	Nama	Instansi	Masukan	Saran
1	IB Putrayasa	Bappeda Prov Bali	Sinkronisasi urusan Perindag untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai tupoksi dan sebagai wadah penjangkaran aspirasi dari asosiasi, masyarakat dan kab kota. Akan ada pembahasan lanjutan di Musrenbang, Rakortek dan lain sebagainya. harapan kami kab kota dan provinsi untuk bersinergi untuk penyusunan tahun 2025. Kami sudah melakukan bilateral meeting dengan Disperindag dan kami akan kawal usulan disperindag di tahap selanjutnya. Dari 7 prioritas pembangunan, ada 2 yang masuk dalam prioritas daerah. APBD Bali tahun 2025 sebesar 6 triliun kepada kabupaten/kota untuk segera menyampaikan usulan agar bisa ditindaklanjuti.	
2	Made Sunarta	Diskop UKM Prov	Berkolaborasi terkait pendataan IKM/UMKM penyandang disabilitas. Pendataan UMKM yang sudah ekspor, kami tidak bisa memantau itu, kami mohon datanya. Daftar buyer luar negeri yang dimiliki Disperindag agar bisa kami kirim ke UMKM kami.	
3	Agung Agra	APRINDO	Belum melihat permasalahan di sector perdagangan, sekarang sangat massif toko toko swalayan berjangkaran nasional. Ini akan menutup ruang gerak bagi UKM UKM kita untuk bisa mengembangkan diri. Ini akan mematikan UMKM yang sudah berdiri karena harus kita akui secara brand equity/image kita kalah. Kalau kita flashback lagi, ini terjadi sejak terbitnya UU Cipta KErja yang sebenarnya tujuan nya sangat baik untuk meningkatkan investasi di Indonesia untuk mempermudah perijinan. Kalau dari kami melihat sebenarnya memudahkan kepada pelaku UKM kita untuk memperluas jaringan bisnisnya. Kondisi ini lebih	



No	Nama	Instansi	Masukan	Saran
			menguntungkan bagi pelaku pemodal besar dan di bali sendiri ini diperparah dengan kondisi covid kemarin. Pelaku lokal untuk bertahan saja susah ya minta ampun apalagi bisa mengembangkan jaringan bisnisnya. Saat itu yang bisa mengembangkan bisnisnya adalah para pemodal besar. Kalau sekarang kita lihat toko-toko swalayan semakin banyak dan ini sangat berbahaya kedepan. Lama lama ini akan menjadi monopoli, saat ini supply barang dari distributor sudah mulai langka di bali. Toko berjejaring nasional ini memiliki bargaining yang kuat sehingga dia bisa mengintervensi para distributor. Akhirnya yang terjadi distributor akan mengutamakan barangnya untuk mensupply brand brand itu sisanya baru disupply ke toko yang lain. Sedangkan kuenya hanya segitu saja. PP 5 2021, toko swalayan dianggap sebagai usaha skala kecil yang tidak beresiko tinggi ke masyarakat sehingga ijinnya hanya cukup NIB saja ini lah celah yang digunakan untuk bisa berkembang.kondisi sekaarng didepan toko/pasar/umkm tradisional ada toko berjejaring nasional. Informasi yang dapat, perusahaan tersebut sudah mulai meloby Kemenkop untuk mengubah beberapa pasal yang menguntungkan pihak mereka. Ini akan mengancam bali kedepan menjadi pulau seribu toko berjejaring.dari hasil penelitian tesis, rasio peluang toko berjejaring di bali adalah yang tertinggi di Bali. Kami harap Disperindag bisa membuat program untuk menanggulangi ini. Anggota kami terdiri dari toko lokal dan nasional, kami disini tidak anti dengan mereka tapi kondisi ritel ini tetap kondusif maka dibutuhkan	



No	Nama	Instansi	Masukan	Saran
			pengahturan kalau tidak diatur maka tidak akan seimbang.	
4	Maria	Perkosmi	Perihatin terhadap sampah plastik, bagaimana kita sama sama untuk mengurangi sampah plastik. Penumpukan sampah plastik sudah terlalu membahayakan bagi pulau ini. Pemetintah harus tegas untuk membuat kegiaiatn yang massif untuk merubah gaya hidup dimana pengolahan sampah sangat penting. Diharapkan aka nada solusi untuk menanggulangi sampah plastik seperti adanya penumbuhan pengrajinpengrajin baru. bisa membuat kampanye daur ulang dan membuat produk olahan dari limbah bahkan ada yang sampai bisa membuat mebel. Meningkatkan promosi kosmetik lokal hingga ke luar negeri. Mendukung usaha kosmetik dan perlu bisnis matching untuk memepertemukan kami dengan investor/hotel/villa. Keluhan kami di pengumpulan data, kalau bisa menjadi 1 pintu, kenapa harus dari banyak kementerian dengan isian yang hampir sama dan ini terlalu buang buang waktu.	
5	Ida Ayu Kalpikawati	Kabid Industri	Sertifikasi halal bagi makanan dan minuman mandatory per 17 oktober 2024. Kalau tidak maka tidak bisa beredar di masyarakat ini menjadi point penting bagi kita karena kita sebagai daerah pariwisata. Menurut UU, makanan dan minuman wajib bersertifikat halal, kalau makanan itu tidak halal tidak diwajibkan. Makanan yang tidak halal harus diberikan label tidak halal artinya harus diberikan informasi terhadap produk tersebut.	
6	Hani	DPD Himki Bali	Mengajukan 3 pameran effect sebagai referensi. Banyak regulasi terkait penerbitan SKA, kami mohon sosialisasi	



No	Nama	Instansi	Masukan	Saran
			perubahan aturan penerbitan SKA. UDR apakah nanti akan menjadi SVLK atau bagaimana	
7	Kepala Bidang Perindustrian	Disperinaker Badung	Solusi kepada IKM agar mengalami peningkatan kualitas produk agar bisa berdaya saing dan mengadakan Rakorda perindag secara rutin tiap tahun	
8	Agung Maha	APINDO	Bali tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata, kami memiliki pelaku ekspor. Kami dibantu DPD untuk pemasaran dan biaya boot pameran luar negeri dan kami juga dikenalkan kepada buyer, kami kendala bahan baku perak. Kami mohon bisa dibantu simulasi mendorong agar bisa Kembali hidup. Pada saat itu sektor kerajinan menjadi andalan ekspor dari bali. Kami ada program Pengusaha mengajar untuk bisa melakukan pembinaan kepada perajin perajin yang ada dan kami ingin terlibat untuk memajukan ekspor yang ada di bali. Kita perlu pembinaan terkait industri kreatif terutama packaging.	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengacu pada RPD Provinsi Bali 2024-2026. Selanjutnya pada Pada Bab III Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusunlah kebijakan Perdagangan pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Perdagangan memiliki 8 arah kebijakan yaitu: 1) mengamankan pasar ekspor di pasar utama, 2) memperluas pasar pangsa ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan Internasional, 3) meningkatkan diversifikasi produk ekspor, 4) mengamankan pasar domestik, 5) meningkatkan kontribusi usaha dagang kecil menengah, 6) meningkatkan perlindungan konsumen, 7) meningkatkan efisiensi sistem dan distribusi logistik, 8) meningkatkan fasilitas dan iklim usaha perdagangan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan industri yang diamanatkan dalam RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2015-2019 pada prinsipnya harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah:

- a. Mengembangkan industri berdaya saing tinggi berbasis kompetensi daerah
- b. Mengembangkan industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan
- c. Mengembangkan sistem informasi industri yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, dan basis data
- d. Menetapkan target ekspor, mendorong peningkatan kualitas produk ekspor daerah yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan kemudahan fasilitas pelayanan publik
- e. Menjaga stabilitas kebutuhan bahan pokok
- f. Meningkatkan sosialisasi terhadap konsumen

2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Tujuan dan sasaran pada RPD Provinsi Bali 2024-2026, Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024-2026 maka, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perindustrian dan perdagangan yang berdaya saing, Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar
- b) Meningkatnya pasar yang dikembangkan
- c) Meningkatnya Perlindungan Konsumen
- d) Meningkatnya industri kreatif yang tumbuh dan berkembang
- e) Meningkatnya Produsen produk sandang lokal Bali
- f) Berkembangnya komoditi Olahan Pangan
- g) Meningkatnya Pelayanan Pengujian Mutu Barang
- h) Meningkatnya Nilai ekspor industri kreatif

3) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan Perindustrian dan Perdagangan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja RKPD, baik jenis program/kegiatan.



Tabel 2.9
Program dan Kegiatan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	► Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	► Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	► Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	► Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	► Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	► Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	► Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	► Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
	► Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	► Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	► Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	► Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	► Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	► Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	► Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
8	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
	► Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
9	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
	▸ Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
D	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
10	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	▸ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
E	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
11	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
	▸ Penjingkatan Citra Produk Ekspor
F	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
12	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▸ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
	▸ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
13	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▸ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
14	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▸ Pengembangan Layanan Pengujian
G	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
14	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	▸ Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
H	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
15	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	▸ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	▸ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
16	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	▸ Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlampir dalam lampiran 1.



BAB V PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025. Terima kasih.



Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali,

Wayan Jarta

NIP. 19641111 198603 1 023



Lampiran 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 Provinsi Bali

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINA \$ PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						22.503.301.834,00							32.824.196.230,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.503.301.834,00							32.824.196.230,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						20.863.434.314,00							24.724.196.230,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	-			82,50	19.287.201.534,00						-	21.926.794.900,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	62.743.600,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	62.743.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Sub Kegiatan	16.000.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	16.000.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Penlokalan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-			1 Sub Kegiatan 100 %	75.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	6.424.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	302.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		335.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-			5 Sub Kegiatan	1.163.664.860,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.247.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	340.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	596.469.960,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		670.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	227.194.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		227.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2 Sub Kegiatan	993.905.980,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	302.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		335.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-			5 Sub Kegiatan	1.163.864.880,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.247.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	340.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	596.469.980,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		670.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	227.194.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		227.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2 Sub Kegiatan	993.905.980,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	822.120.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	171.785.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			82,00 Indeks	322.947.320,00						-	550.000.000,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-			14000 Dokumen	322.947.320,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha	-	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				14000 Dokumen	322.947.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	-			1 Pasar	24.968.600,00						-	150.000.000,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	-			2 Pasar	24.968.600,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pengloa Pasar / Pasar	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				2 Laporan	24.968.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pengloa Pasar / Pasar		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	-			<7 Persen	244.884.500,00						-	175.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	-			18 Kali	244.884.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat	-	175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				5 Laporan	244.884.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	-			55 Persen	99.999.600,00						-	300.000.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	-			4 Pelaku Usaha	99.999.600,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksportir / Pelaku USaha	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				50 Produk	99.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksportir / Pelaku USaha		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	-			49,72 Indeks	591.354.180,00						-	1.274.803.250,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	-			100 %	485.990.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / BPKS / LPKSM	-	1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				1 BPSK	458.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / BPSK / LPKSM		850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				3 LPKSM	9.990.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / BPSK / LPKSM		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	-			100 % 100 %	125.383.980,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha	-	174.803.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				100 Laporan	125.383.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha		174.803.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	-			30 Persen	292.078.580,00						-	347.598.080,00	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali	-			100 Toko	292.078.580,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	UKM / Pelaku Usaha	-	347.598.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				5 Laporan	292.078.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	UKM / Pelaku Usaha		347.598.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.639.867.520,00							8.100.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	-			1,5 Persen	1.589.867.620,00						-	7.500.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	-			1,5 %	1.589.867.620,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	7.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				9 Dokumen	137.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				6 Dokumen	1.462.185.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		6.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	-			100 Persen	49.999.900,00						-	600.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	-			100 %	49.999.900,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				150 Dokumen	49.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD RUMAH KREATIF						1.024.340.340,00							1.406.700.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.024.340.340,00							1.406.700.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.024.340.340,00							1.406.700.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	-			82,50	197.126.840,00						-	329.700.000,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Sub Kegiatan	46.087.560,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	164.700.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	33.436.060,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.239.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.500.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.212.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.200.000,00	UPTD RUMAH KREATIF



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-			1 Sub Kegiatan	49.372.140,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	55.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	49.372.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Sub Kegiatan	101.667.140,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	110.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	101.667.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	-			1,5 Persen	827.213.500,00						-	1.077.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	-			1.5 %	827.213.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	1.077.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	827.213.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		1.077.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						582.448.512,00							1.602.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						582.448.512,00							1.602.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						582.448.512,00							1.602.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	-			82.50	335.196.492,00						-	552.000.000,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Sub Kegiatan	45.313.240,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	82.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.455.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.922.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		40.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.038.040,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		25.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5.797.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	-			2 Sub Kegiatan	171.298.560,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	270.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		20.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	159.298.560,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		250.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Sub Kegiatan	118.584.692,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	200.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	118.584.692,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	-			49,72 Indeks	247.252.020,00						-	1.050.000.000,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	-			45 Sertifikat	247.252.020,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha / Eksportir / Konsumen	-	1.050.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NA SIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				45 laporan	247.252.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha / Eksportir / Konsumen		1.050.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
			J U M L A H					24.110.090.686,00							35.832.896.230,00		



LAMPIRAN 2. Review terhadap rancangan RKPD Provinsi Bali

Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal RKPD		Rencana Kerja RKPD	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					22.503.301.834,
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					20.863.434.314
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)			82,50	19.287.201.534,
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	62.743.600,
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	62.743.600,
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Sub Kegiatan	16.000.000.000
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/Bulan	16.000.000.000	81 Orang/ Bulan	16.000.000.000,
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1 Sub Kegiatan 100 %	75.000.000,
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			3 Orang	75.000.000,
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			6 Sub Kegiatan	991.887.094,
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	14.899.100,
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.000.000.000	20 Paket	550.895.100



3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.500.000	1 Paket	102.483.394,
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	2 Paket	14.840.500,
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.000.000	24 Dokumen	6.424.000,
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD J	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	330.000.000	28 Laporan	302.345.000
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			5 Sub Kegiatan	1.163.664.860
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	340.000.000
3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	596.469.960
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.194.900	12 Laporan	227.194.900
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2 Sub Kegiatan	993.905.980
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.000.000.000	17 Unit	822.120.700
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	800.000.000	2 Unit	171.785.280
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82,00 Indeks	322.947.320
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			14000 Dokumen	322.947.320



	Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	500.000.000	14000 Dokumen	322.947.320
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA	Jumlah Pasar ber SNI			1 Pasar	24.968.600
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina			2 Pasar	24.968.600
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Laporan	140.000.000	2 Laporan	24.968.600
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok			<7 Persen	244.884.500
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah			18 Kali	244.884.500
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Laporan	100.000.000	5 Laporan	244.884.500
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif			55 Persen	99.999.600
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran			4 Pelaku Usaha	99.999.600



3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	50 Produk	200.000.000	50 Produk	99.999.600
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen			49,72 Indeks	591.354.180
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses			100 %	465.990.200
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	700.000.000	1 BPSK	456.000.000
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	9 LPKSM	150.000.000	3 LPKSM	9.990.200
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan			100 % 100 %	125.363.980
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	60 Laporan	139.842.600	100 Laporan	125.363.980
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali			30 Persen	292.078.580
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali			100 Toko	292.078.580
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	5 Laporan	322.598.080	5 Laporan	292.078.580
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.639.867.520
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh			1,5 Persen	1.589.867.620



3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina			1.5 %	1.589.867.620
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9 Dokumen	1.000.000.000	9 Dokumen	137.682.000
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	5.000.000.000	6 Dokumen	1.452.185.620
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri			100 Persen	49.999.900
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul			100 %	49.999.900
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150 Dokumen	500.000.000	150 Dokumen	49.999.900
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.024.340.340
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.024.340.340,
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)			82,50	197.126.840,
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Sub Kegiatan	46.087.560
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85.000.000	2 Paket	33.436.060
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaka	1 Paket	3.000.000	1 Paket	2.239.500



3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	3.212.000
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.760.000	1 Laporan	7.200.000
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			1 Sub Kegiatan	49.372.140
3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	49.372.140
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Sub Kegiatan	101.667.140
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	105.000.000	2 Unit	101.667.140
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh			1,5 Persen	827.213.500,
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina			1.5 %	827.213.500
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	952.000.000	1 Dokumen	827.213.500
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					582.448.512
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					582.448.512
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			82.50	335.196.492
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			5 Sub Kegiatan	45.313.240



3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	1 Paket	1.455.700
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	1 Paket	19.922.500
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	16.038.040
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	1 Paket	2.100.000
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	5.797.000,
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)			2 Sub Kegiatan	171.298.560
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	12.000.000
3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	159.298.560,
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Sub Kegiatan	118.584.692
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	150.000.000	3 Unit	118.584.692
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen			49,72 Indeks	247.252.020
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan			45 Sertifikat	247.252.020
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	45 Laporan	1.000.000.000	45 laporan	247.252.020